

**PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG**

TESIS

*Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum*



OLEH:

**RAHMA NOVIYANTI
NIM. 1620112062**

KOMISI PEMBIMBING :

**PROF. Dr. ELWI DANIL, S.H., M.H.
Dr. YOSERWAN, S.H., M.H. LL.M.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2019**

**PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI
DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENGADILAN NEGERI PADANG**

(Rahma Noviyanti, 1620112062, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 123 halaman, 2019)

ABSTRAK

Tindak Pidana Korupsi di Indonesia saat ini telah menjadi kejahatan serius yang dilakukan secara sistematis dan berdampak luas dalam kehidupan masyarakat. Harta kekayaan negara yang seharusnya dimanfaatkan bagi pembangunan agar tercapai kesejahteraan kehidupan masyarakat, dipergunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadinya. Melalui instrumen UU Korupsi negara mengusahakan pemberantasan dan mengupayakan harta kekayaan negara yang telah di korupsi kembali ke tangan negara. Pengembalian harta kekayaan negara tersebut diupayakan dengan cara penerapan pidana tambahan berupa pembayaran pidana uang pengganti. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan pembayaran uang pengganti Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Uang Pengganti dalam rangka memberikan pemahaman yang sama kepada penegak hukum khususnya hakim dalam pembebanan Perma Uang Pengganti pada terdakwa korupsi. Permasalahan dalam tesis ini adalah: 1) bagaimanakah penerapan Perma Uang Pengganti dalam putusan hakim bagi terdakwa tindak pidana korupsi. 2) bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana tambahan uang pengganti bagi terdakwa Tindak Pidana Korupsi. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis. Tipe penelitiannya adalah deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa: 1. Belum semua Hakim menjatuhkan putusan pidana tambahan uang pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi berdasarkan pasal 1 Perma No. 5 tahun 2014, Hakim dengan independensinya menjatuhkan pidana pengganti yang bervariasi mulai dari hitungan bulanan, sehingga tujuan pengembalian kerugian keuangan negara akibat suatu Tindak Pidana Korupsi sulit dicapai, karena terdakwa akan lebih memilih untuk menjalankan hukuman subsidair. 2. Pertimbangan hakim dalam penerapan Perma No. 5 Tahun 2014 dipengaruhi oleh pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis sehingga mengakibatkan adanya disparitas hukuman pidana tambahan uang pengganti. Untuk perbaikan penegakan hukum di masa depan, Mahkamah Agung perlu mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada hakimnya agar hakim mempunyai pemahaman yang sama dalam penjatuhan pidana uang pengganti terhadap terdakwa Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci : Pidana Uang Pengganti, Korupsi, dan Perma Uang Pengganti.

**THE IMPLEMENTATION OF SUPREME COURT REGULATION
NUMBER 5 OF 2014 ON THE ADDITIONAL PUNISHMENT OF
SUBSTITUTE MONEY IN CRIMINAL ACT OF CORRUPTION IN
DISTRICT COURT OF PADANG**

(Rahma Noviyanti, 1620112062, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Andalas, 123 halaman, 2019)

ABSTRACT

Corruption in Indonesia is currently a serious crime that is carried out systematically and has a broad impact on people's lives. State's assets which should be used for development in order to benefit the society, are used for personal interests. Through the Corruption Law, the State tried to eradicate corruption and restore assets that have been corrupted. The restoration is endeavored by the application of additional punishment in the form of payment of substitute money. In order to optimize the implementation of the payment, the Supreme Court has issued a regulation of Substitute Money to provide the same understanding for the Law Enforcers, specifically Judges, in the imposition of the regulation on Defendants of Corruption. The problems in this Thesis are: 1) How is the implementation of Supreme Court Regulation on Substitute Money in the verdict to the defendants of corruption. 2) How the judges take consideration on deciding additional punishment of substitute money to the defendants of corruption. The method used in this research is sociological juridical method. The type of the research is descriptive by using primary data and secondary data. The results of the study revealed : 1. not all Judges have ruled out additional money in the Corruption Follow-up Act based on article 1 Perma No. 5 of 2014, Judges with the independence of varying penalties starting from the calculation, spending the state financial aid funds on the Corruption Crime Follow-up is difficult to ask, because the defendant would prefer to use the law on air. 2. Judge's Consideration in applying Perma No. 5 of 2014 concerning juridical considerations and non-judicial considerations. From those two parts it is discovered that in the verdict there are differences in understanding the basis of the punishment. To improve the law enforcement in the future, the Supreme Court needs to conduct socialization and training so that judges have the same understanding on the imposition of substitute money to the defendants of corruption.

Keywords : Punishment of Substitute Money, Corruption, and Supreme Court Regulation on Substitute Money.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT penguasa alam semesta, atas segala rahmat dan nikmat serta karunia yang telah diberikan-Nya dalam membukakan hati dan pikiran penulis, sehingga tesis dengan judul **“PENERAPAN PERMA NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG PIDANA TAMBAHAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DI PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI PADANG”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, sebagai panutan dan pimpinan umat Islam.

Keberhasilan penulis menempuh studi tidak terlepas dari do'a orang-orang terkasih. Izinkan penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada orang tua mama Ainurni Yunus dan saudara-saudara (kakak/adik) tercinta atas doa yang tiada henti demi kelancaran dan kesuksesan penulis, kepada orang-orang terkasih suami Bustami, S.H. dan ananda Amanda Ghania Kamila untuk doa dan kesabarannya, serta saudara-saudara lainnya yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.

Selanjutnya penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Elwi Danil, S.H.,M.H. selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Yoserwan, S.H.,M.H. LLM. selaku Pembimbing II yang dengan kesabaran telah memberikan waktu, bimbingan dan ilmu pengetahuan untuk membantu dalam penyelesaian tesis ini.

Penulisan tesis ini juga menjadi lebih baik setelah mendapat masukan dari para penguji. Untuk itu penulis juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Fadillah Sabri, S.H.,M.Hum, Ibu Dr. Aria Zurnetti, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.CI

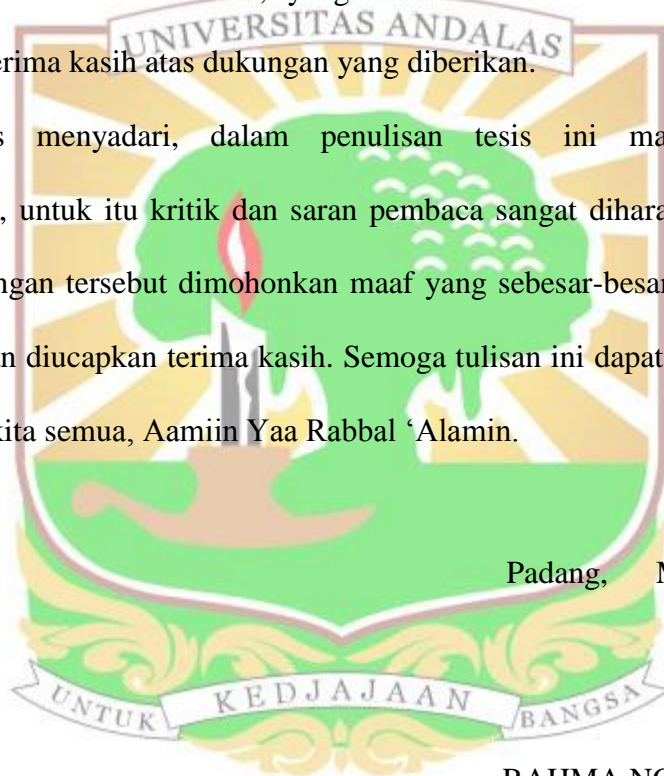
Selanjutnya penghargaan dan terima kasih disampaikan pula kepada:

1. Bapak Dr. Busrya Azheri, S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas
2. Ibu Dr. Khairani, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas
3. Ibu Dr. Yasniwati, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas
4. Seluruh bapak dan ibu dosen/ staf pengajar Fakultas Hukum Unversitas Andalas.
5. Seluruh karyawan/ti Fakultas Hukum Universitas Andalas khususnya pada Program Magister Ilmu Hukum yang telah memberikan bantuan sehingga prosedur tesis ini berjalan lancar.
6. Bapak Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang, Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Bapak Dr. Gutiarso, S.H., M.H. Hakim Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Padang Ibu Emria Fitriani, S.H., M.H. dan Ibu Elisya Florence, S.H., M.H. serta Panitera Muda Hukum Bapak M. Ari Sultony, S.H. atas bantuan

dan kerja samanya untuk mengakses beberapa putusan perkara Tindak Pidana Korupsi dan pandangan hukum serta ilmu yang diberikan.

7. Teman-teman Jaksa Pengacara Negera dan pegawai Tata Usaha Negara pada Bidang DATUN Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat atas bantuan dan dukungan yang diberikan.
8. Rekan-rekan seangkatan pada Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Andalas, yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu, terima kasih atas dukungan yang diberikan.

Penulis menyadari, dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran pembaca sangat diharapkan. Terhadap segala kekurangan tersebut dimohonkan maaf yang sebesar-besarnya serta untuk kritik dan saran diucapkan terima kasih. Semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, Aamiin Yaa Rabbal 'Alamin.



Padang, Maret 2019

RAHMA NOVIYANTI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	18
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	20
F. Metode Penelitian.....	34
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Sanksi Pidana dalam KUHP dan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	39
B. Tindak Pidana Korupsi.....	44
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	44
2. Sejarah Perundang-Undang Korupsi.....	61
C. Pidana Pembayaran Uang Pengganti.....	67
1. Uang Pengganti dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.....	67
2. Uang Pengganti dalam Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Uang Pengganti.....	78
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Perma Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pembayaran Uang Pengganti dalam Putusan Hakim bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.....	81
B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pidana Tambahan Berupa Pembayaran Uang Pengganti bagi Terdakwa Tindak Pidana Korupsi.....	95

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan..... 121

B. Saran..... 122

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

